

Jurnal_baru_Indra_1.doc

by Indra Kurniawan

Submission date: 04-Jan-2020 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1239222441

File name: Jurnal_baru_Indra_1.doc (102K)

Word count: 3205

Character count: 20248

The Empowering Small and Medium Enterprises (SME's) through Improvement of Competitive Advantages

Indra Kurniawan*)

Abstract

The international commerce of ASEAN inter-states in the future yielded by contribution of UKM (SME's) can not be looked from one side, because UKM is expected to replace of corporations. The number of UKM business units in 2003 is 42,4 million rising of 9,5 % compared with that in 2000.

At present the contribution the GNP growth of UKM is higher than that of corporates. In 2000 out of 4,9 % growth of total national GNP, 2,8 % came from UKM. In 2003 out of 4,1 % growth of total national GNP, 2,4 % was from UKM. Considering the significant role of UKM, they have to be integrated in national economy potentials. By giving amenities to banking capital access, training for uplifting skills, leadership and management it is expected that UKM will be able to survive and have competitive power.

Keywords : *Small and Medium Enterprise, Improvement, Contributions.*

1. Pendahuluan

Munculnya krisis global akhir-akhir ini berdampak cukup besar dinegara-negara yang memiliki ekonomi mapan, dan ini terjadi di negara-negara maju baik di Eropa, Amerika khususnya dan beberapa diantaranya Asia dan Australia. Ini mengingatkan kami bagaimana kesombongan Negara maju dalam mengatur sistem ekonomi dengan pendekatan mekanisme pasar yang sangat dijunjung tinggi meskipun kita mengakui bahwa itu juga benar. Dapat kita bedakan krisis yang terjadi pada masa tahun 1998 dengan krisis tahun 2009 ini terdapat perbedaan pandangan bahwa, krisis yang terjadi pada tahun 1998 dikarenakan implementasi disharmonis ekonomi, inflasi cukup tinggi, nilai tukar rupiah terdepresiasi juga cukup besar, dan begitu kuatnya KKN pada masa itu sehingga ketidakpercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintah. Sedangkan krisis tahun 2009 saat ini terkonsentrasi pada sektor financial yang hanya berdampak pada pasar uang yang juga berimbas pada menurunnya pasar ekspor, sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan devisa.

Namun demikian *survival* ekonomi masyarakat Indonesia ditopang pada kekuatan sektor informal yang merata di daerah. UKM (usaha kecil dan menengah) telah terbukti tidak begitu berdampak dengan adanya krisis global tersebut. Saya ingat tulisan dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa jika di Indonesia terdapat 20 persen wirausaha dari populasi maka akan terjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Kontribusi yang dapat dihasilkan diantaranya, reduksi pengangguran yang cukup besar, sehingga ekuivalen dengan kemampuan daya beli.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam *output* nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (*Kompas*, 14/12/2001). Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.

Upaya menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat strategis dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat perubahan struktural dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Usaha berskala mikro, kecil dan menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar, diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional yang mampu *survive* pada kondisi krisis. Pemerintah begitu gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan peran UKM seperti diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2008, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pola penjaminan pemerintah yang diikuti relaksasi kebijakan bidang perbankan untuk mendorong kemudahan layanan pendanaan oleh perbankan.

Sebagai pembanding dari data pada tahun 2001 yang telah penulis sampaikan di atas bahwa terjadi progresivitas UKM dalam data statistik sehingga beralasan mengapa pemerintah begitu gencar dalam mengembangkan UKM yaitu: (1) Jumlah populasi UKM di 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia, (2) Ekspor hasil produksi UKM selama 2007 mencapai Rp142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional Rp713,4 triliun. Nilai investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp 462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia, serta (3) Produk Domestik Bruto (PDB) UKM di 2007 tumbuh 6,4 persen, lebih tinggi daripada PDB nasional, mencapai Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia.

Namun, dibalik usaha potensial tersebut, sesuai karakteristiknya, UKM memiliki keterbatasan yang sering kita jumpai terutama pada aspek pengelolaan usaha, sumber daya manusia, produktivitas dan kualitas, struktur permodalan, inovasi, akses pemasaran ke pasar yang potensial, kemampuan menghasilkan laba, kelangsungan usaha dan akses pembiayaan dari perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dijalankan tidak dapat lagi dilihat dari satu sisi pendekatan ekonomi, tapi memerlukan serangkaian strategi kebijakan yang berfungsi sebagai stimulan serta mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UKM.

2. Dinamika UKM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara tegas menyatakan, tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan: (1) upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha melalui rumusan kebijakan yang terintegrasi dan akuntabel, (2) membaiknya stabilitas perekonomian yang ditandai oleh laju inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga SBI yang menurun diikuti secara proporsional oleh suku bunga pinjaman sehingga mendorong sektor riil untuk bergerak, (3) dukungan akses pembiayaan baik melalui pemberian dana bergulir atau kredit program bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi dengan mengembangkan pola tanggung renteng maupun pembiayaan yang bersumber dari dana bank dan non bank, (4) *technical assistance* yaitu program pendampingan, pelatihan ketrampilan dan pembinaan pada aspek-aspek kualitas produksi, *value added* dan efisiensi sumber daya (*business side*), dan (5) membuka akses pasar, kemudahan untuk mengakses informasi usaha, melaksanakan promosi dan pameran, pengembangan jaringan kemitraan dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM (Berry, dkk, 2001). Alasan *pertama* adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Kuncoro (2000) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di

3. Kontribusi UKM terhadap reduksi pengangguran

Krisis ekonomi, apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 1998) menegaskan bahwa ketiga persoalan itu oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian (Watterberg dkk, 1999). Dengan kata lain, ketiga hal itu merupakan persoalan sangat pelik yang dihadapi masyarakat pada umumnya.

Kondisi ketenagakerjaan pada masa krisis kiranya dapat memberikan gambaran dampak sosial dari krisis ekonomi (Tabel 1). Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Krisis ekonomi juga telah membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya pangsa pekerja sektor formal menjadi 35,1. Dengan kata lain, peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal sendiri merupakan sektor dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada.

Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia, 1996 dan 2000

Karakteristik	1996	2000
Angkatan kerja (juta)	88,2	95,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,9	67,8
Angkatan Kerja Perkotaan (%)	33,9	39,3
Pekerja sektor Formal (%)	37,9	35,1
Pekerja Paruh-Waktu (%)	33,3	26,7
Tingkat Pengangguran (%)	4,9	6,1

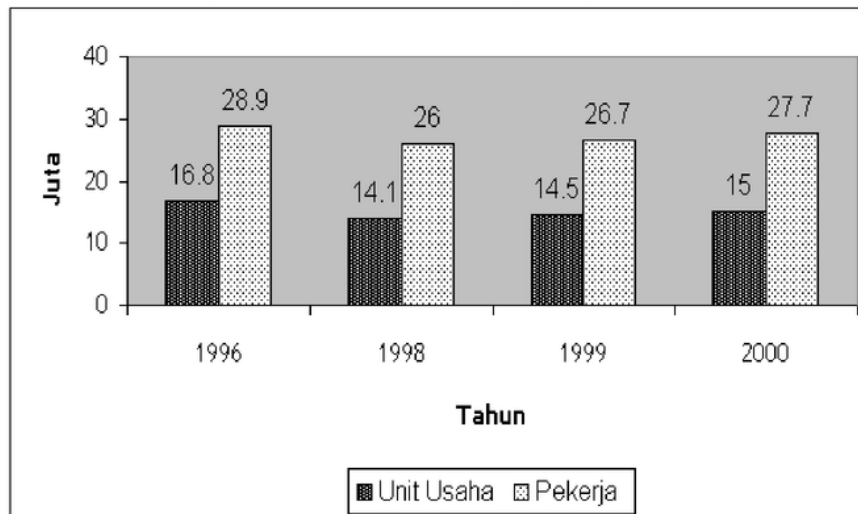
Sumber: Sakernas, dikutip dari Suryahadi, dkk (2003), Tabel 1.

Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa UKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi (*Kompas*. 14/12/2001). Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal tersebut ada benarnya

setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat.

UKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar? Bukan tidak mungkin produk-produk UKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat.

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Pekerja UKM, 1996-2000



Gambar di atas disusun berdasarkan Hasil Survei Usaha Terintegrasi yang dilakukan BPS kiranya dapat berguna untuk memberikan gambaran bagaimana peranan

UKM bagi masyarakat di masa krisis. Survei tersebut terbatas hanya pada UKM yang tidak berbadan hukum sehingga hasilnya dapat juga merefleksikan sektor informal. Seluruh sektor ekonomi dicakup oleh survei tersebut, kecuali sektor pertanian. Oleh karena tidak mencakup sektor pertanian, maka hasil survei tersebut akan lebih mencerminkan UKM di perkotaan mengingat sektor pertanian sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi penting karena Watterberg dkk (1999) juga menyimpulkan bahwa dampak sosial dari krisis ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

4. Masalah Seputar UKM di Indonesia

Masyarakat sebenarnya telah paham bahwa strategi pengembangan UKM dan ekonomi rakyat secara umum tetap harus berbasis pada dua pilar utama yaitu (1) tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat, (2) dan berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif, namun untuk menegakkan dua pilar utama tersebut sering terjebak dalam pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung mementingkan hasil dari pada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil tersebut. (Primiana, 2009)

Basis UKM sendiri dan ekonomi rakyat secara umum ternyata sangat lemah dalam visi, sikap wirausaha dan manajemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim cukup bertahan dalam menghadapi krisis. Eksistensi UKM diakui masih belum bisa terlepas dari beberapa permasalahan klasik terutama masalah akses modal, dan kesempatan mendapatkan peluang usaha disamping masalah lain seperti produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi. Dapat diilustrasikan beberapa masalah yang menghambat perkembangan UKM antara lain :

1. Permodalan

- a. Kurangnya akses ke Bank dan lembaga keuangan lainnya
- b. Prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit, lama dan suku bunga yang tinggi

- c. Bank kurang memahami criteria UKM sehingga kredit yang diberikan tidak sesuai kebutuhan
- d. Kurangnya komunitas UKM membuat standard proposal yang baik dan benar
- e. Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan dan pelaporan
- f. Kredit yang diperlukan UKM tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha

2. Pemasaran

- a. Akses terhadap informasi pasar kurang
- b. Terbatasnya tempat pemasaran
- c. Kesulitan mencari agen atau pembukaan outlet, terutama diluar negeri
- d. Kuatnya persaingan pasar dan produk
- e. Kurangnya manajemen pemasaran
- f. Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak
- g. Mahalnya sewa sarana dan tempat penjualan
- h. Kurangnya kerjasama dengan perusahaan besar, sesama UKM, pihak luar negeri terutama dalam hal promosi
- i. Kelembagaan pendukung (asosiasi) tidak berfungsi untuk membantu promosi
- j. Penjiplakan/pemalsuan produk

3. Bahan Baku

- a. Harga bahan baku yang mahal dan berfluktuasi akibat borongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol harga
- b. Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi
- c. Kesulitan penyimpanan
- d. Pengiriman tidak tepat waktu
- e. Prosedur impor bahan baku yang tidak jelas
- f. Lokasi bahan baku yang jauh

4. Teknologi

- a. Kurangnya pelatihan untuk teknologi baru/tepat guna
- b. Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru
- c. Kurangnya informasi tentang teknologi baru atau tepat guna yang sesuai kebutuhan
- d. Mahalnya pemeliharaan
- e. Harga yang mahal
- f. Mutu yang rendah

5. Manajemen

- a. Tidak ada pembagian kerja (*job description*) yang jelas
- b. Kuatnya pengaruh perseorangan (direktur)
- c. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga
- d. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan
- e. Manajer kurang mampu merancang strategi bisnis
- f. Rendahnya produktivitas pekerja

6. Birokrasi

- a. Kurangnya informasi tentang ijin yang mesti dimiliki
- b. Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
- c. Pungutan yang tidak jelas
- d. Adanya monopoli
- e. Ketidakberpihakan pemerintah pada UKM
- f. Adanya kuota ekspor

7. Infrastruktur

- a. Tarif mahal
- b. Pelayanan kurang
- c. Kualitas/kuantitas kurang

8. Kemitraan

- a. Sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan UKM
- b. Sistem pembayaran yang merugikan
- c. Kurangnya transfer teknologi

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan bagi industri. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang tinggi niscaya produk-produk dalam negeri tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestic kita. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk-produk UKM tidak dapat ditunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian dari berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku UKM itu sendiri tetapi juga para aparat birokrasi, berbagai organisasi asosiasi, dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari UKM.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*, harus tunduk terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh GATT, begitu juga AFTA dan APEC bahwa era perdagangan bebas telah ditetapkan dan harus diberlakukan pada tahun 2003 (AFTA), dan tahun 2020 (APEC). AFTA yang berlaku 2003 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dengan konsekwensi Indonesia harus siap menghadapi persaingan ketat dengan Negara-negara lain baik dalam bidang produk/perdagangan (*product/trading*) maupun jasa-jasa (*services*) dan kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak positif ataupun negative.

Terdapat empat konsekuensi dari era perdagangan bebas, yaitu pertama, akan datangnya modal asing dan keterampilan teknik. Pemain asing akan masuk ke suatu Negara dengan membuka cabang anak perusahaan, atau dalam bentuk patungan (*joint ventures*). Tenaga ahli asing juga akan datang ke Indonesia dan mengisi kekurangan tenaga ahli di ebrbagai bidang. Kedua, globalisasi akan bisa mempercepat inovasi produk dan diversifikasi pemasaran. Ketiga, kehadiran modal baru akan menambah kompetisi di pasar domestic dan akan semakin meningkatkan persaingan yang saat ini sudah sangat ketat. Dan keempat, globalisasi juga membuka peluang perusahaan yang siap untuk go internasional. Perusahaan nasional yang mempunyai modal dan kemampuan yang cukup bisa membuka cabang di luar negeri.

Jika dilihat dari berbagai konsekuensi diatas hal yang paling mendasar adalah kemampuan daya saing (*competitive advantage*) merupakan sebuah keharusan agar perusahaan dapat bertahan. Seperti dalam laporan *World Economic Forum* (WEF), suatu badan independent yang berkedudukan di Jenewa, menunjukkan tingkat daya saing Indonesia pada tahun 2003 mencapai posisi terendah diantara Negara ASEAN lainnya. Singapura tertinggi, bahkan Vietnam secara makro memiliki posisi yang lebih baik dari Indonesia dan Filipina. Dari kedua kriteria yang digunakan dalam laporan WEF yaitu sisi makro (*Growth Competitiveness Index / GCI*) dan sisi mikro (*Business Competitiveness Index / BCI*), Indonesia menempati posisi ke-72 untuk GCI dan posisi ke-60 untuk BCI dari 102 negara. (Primiana, 2009)

Sedangkan laporan GCI pada tahun 2005, dari 116 negara Indonesia menempati posisi ke-74 dalam tingkat daya saingnya, turun dua poin dari tahun 2003. Di ASEAN posisi Indonesia lebih baik bila dibandingkan Filipina yang menempati posisi ke-77 dan Vietnam di posisi ke-81. Namun Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang berada pada posisi ke-6, Malaysia posisi ke-24 naik tujuh poin dari tahun sebelumnya, dan Thailand di posisi ke-36. seperti pada table berikut :

Tabel 2. Peringkat GCI Negara ASEAN

Negara	2004	2005	+/-
Singapore	7	6	+ 1
Malaysia	31	24	+ 7
Thailand	34	36	- 2
Indonesia	69	74	- 5
Philipina	76	77	- 1
Vietnam	77	81	- 4

Sumber : GCI Report 2005, dikutip dari Primiana (2009)

Turunnya peringkat GCI juga menunjukkan rendahnya kepercayaan pasar internasional terhadap produksi dalam negeri, sehingga dibutuhkan usaha-usaha untuk meningkatkannya. Usaha-usaha yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian agar

memiliki daya saing dapat menerapkan salah satu dari strategi bisnis yaitu *Low Cost Leadership* dan *Differentiation* (Porter, 1990). *Low Cost Leadership* adalah kemampuan untuk merancang, memproduksi, dan memasarkan suatu produk agar lebih efisien dibandingkan pesaing. Sedangkan *Differentiation* adalah kemampuan untuk memproduksi sesuatu dengan nilai yang unik dan superior melalui kualitas produk, *feature* yang spesial, atau layanan purna jual. Dari kedua strategi yang dikemukakan diatas yang menjadi kendala utama adalah strategi yang pertama namun demikian strategi yang keduanya juga bisa menjadi kendala pada produk-produk dalam negeri.

5. Penutup

Dari beberapa uraian diatas maka penguatan sector riil agar diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, melalui peran UKM yang solid. Dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh UKM terkait dengan modal, manajerial dan penciptaan produk yang berkualitas diperlukan usaha-usaha yang terfokus untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dan kelemahan tersebut. Adapun berkenaan dengan hambatan dalam produksi agar UKM dapat menghasilkan produk yang berkualitas dapat diberikan pelatihan-pelatihan yang penanganannya lebih mudah dari pada masalah pemodal dan pemasaran. Dituntut komitmen yang kuat dalam membantu dan menyelesaikan beberapa hambatan UKM melalui bantuan yang lengkap hingga UKM siap mandiri yang antara lain adalah :

1. Adanya pembinaan monitoring dan evaluasi (Monev) pasca penyaluran dana oleh perbankan atau instansi lain untuk meyakinkan keberhasilan dan ketepatan penyaluran, agar peran perbankan/instansi lain tidak terbatas pada *output* saja tetapi pada *outcome*.
2. Untuk pemodal perlu dikembangkan mekanisme pembiayaan lain bagi UKM yang butuh dana cepat dan pinjaman dalam waktu pendek (1-3) bulan. Sebagai dasar pertimbangan pemberian dana bias digunakan data histori penjualan selama 1-3 tahun kebelakang, *Purchase Order (PO)* dari pemesan, untuk transaksi menggunakan rekening bank pemberi dana guna memperkecil risiko tidak

terbayarnya pinjaman dan bila memungkinkan rekomendasi dari komunitas UKM yang bias dipertanggung jawabkan.

3. Untuk pemasaran perlu dikembangkan pusat perdagangan nasional yang memungkinkan ekspor-impor antar daerah serta mengembangkan marketing intelligence bagi produk siap ekspor diberbagai tingkatan daerah oleh dinas industri dan perdagangan atau ditingkat nasional dan internasional oleh departemen perdagangan. Upaya optimalisasi melalui atase-atase perdagangan dengan fungsi sebagai *industrial espionage* bagi hasil produksi dalam negeri dan menginformasikan pada dinas melalui departemen industri dan perdagangan sehingga tersedia data base profil UKM dengan demikian akan mempermudah dalam mencari solusinya.

PUSTAKA

- Akita, T dan A. Alisjahbana, 2002, "Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 38 (2): 201-222.
- Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, "Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 363-384.
- Brata, Aloysius Gunadi, *Distribusi Spasial UKM dimasa krisis ekonomi*, lemlit Universitas Atmajaya Jogjakarta
- Kompas, 2001, "Memupuk UKM, Menuai Pemulihan Ekonomi". 14 Desember 2001.
- Kuncoro, M., 2002, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Primiana, Ina, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Alfabeta Bandung
- Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto, 2003, "Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 39 No 1, 29-50.
- Watterberg, A., S. Sumarto, L. Pritchett. 1999. "A National Snapshot of the Social Impact of Indonesia's Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 35 No 3, 145-152.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

11%

★ Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 10%